

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Definisi Partai Politik

Didalam dunia perpolitikan, khususnya dalam dunia politik lokal akan memudahkan untuk dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi dari partai politik. Tiga teori yang mencoba untuk menjelaskan asal usul dari partai politik. Yang pertama, teori kelembagaan yang berhubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. kedua, teori situasi historik yang timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik dalam mengatasi suatu krisis yang ditimbulkan perubahan dari masyarakat luas. Ketiga, teori pembangunan yaitu teori yang di lihat dari partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. (*Surbakti Ramlan, 1991 hal 23*)

Partai Politik juga terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan suatu faktor yang perlu diikuti sertakan dalam proses politik yang melalui partai politik dengan rakyat yang ikut berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasinya dan kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan yang tersalurkan melalui partai politik.

Dari suatu anggapan menyatakan bahwa dengan membentuknya wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa jauh lebih besar dalam suatu pembentukan dan pelaksanaan

dari suatu keputusan. Beberapa para ahli telah mendefinisikan partai politik diantaranya Carl J. Friedrich yang menuliskannya sebagai berikut:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages)”. (Mariam Budiardjo, 2008 hal 78)

Sigmund Neumann dalam bukunya, *Modern Political Parties*, juga mengemukakan definisi sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (a political party is the articulate organization of society’s active political agent; those who are concerned with the control of govermental policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view)”.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Yang bertujuan untuk memperoleh suatu kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (UU no 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1)

B. Fungsi partai Politik

Dalam memahami suatu peran partai politik, perlu memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo yang terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut.

1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi yang menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada.

Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut sudah diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat dapat berkurang. Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum.

Partai politik juga berfungsi sebagai memperbincangan dan menyebarluasan dari rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu

untuk dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok.

2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Proses ini merupakan faktor yang penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush menyatakan Bahwa:

“Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena)”.

A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi dari sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

4. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Teori fungsi partai milik Miriam Budiardjo diatas selaras dengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan adanya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu faktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik juga menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai politik juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian tentang “Dewan Pengurus Cabang (DPC) Peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palembang Dalam Melaksanakan Fungsi Partai Politik” ini masing-masing telah dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian Mohammad Andhika Yasmana (yasmana, 2018) yang berjudul Partai Politik dan Pemilu Dalam Sikap Politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam Menanggapi Presidential Threshold 2019 yang mana penelitian ini terfokuskan kepada upaya yang dilakukan PKB dalam menghadapi proses penentuan Presidential Threshold pada RUU tentang pemilu tahun 2017, yang mana suatu kekuatan elit sangatlah berdampak dalam sikap politik sebuah partai politik.

Dalam proses pembahasan RUU pemilu mempunyai kajian bersama di internal untuk mendengarkan para kadernya, setelah peran ketua umum PKB sangatlah mengintervensi fraksinya untuk selalu patuh kepada pimpinan partainya sehingga tidak ada kader dari PKB yang melakukan manuver politik sendiri. Dibawah kepemimpinan cak Imim sebagai ketua umum PKB.

Salah satu masalah dalam krusial yang sedang diperdebatkan ialah Presidential Threshold 2019 sehingga didalam suatu pengesahannya dilakukan dengan cara voting dalam siding paripurna DPRD RI. Sikap politik PKB dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 ini tidak terlepas dari ikut campur tangan ketua umum, dibantu oleh Fraksi di DPR cak Iman selalu memberikan intruksi dan pandangan terhadap RUU pemilu. (*Andhika Yusmana, 2018 hal 34*)

PKB berhasil mendapatkan kepercayaan dari Fraksi untuk menjadikan Lukman sebagai ketua Pansus. Dengan mendapatkannya posisi ketua pansus, PKB menilai bahwa terjadi banyak peluang dari politik yang di peroleh oleh PKB sehingga

memuka lebar kesempatan untuk bernegosiasi dengan Fraksi. Saat membahas RUU PKB mengeluarkan opsi D. Opsi D tersebut yang berbunyi Presidential threshold 10-15%, Parliamentary Threshold 5%, system pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-8 dan metode dalam konvensi suara merupakan suara saint laque murni. Namun opsi yang dikeluarkan oleh PKB yang awalnya PKB ingin memecah kebutuhan antara dua kekuatan yang sedang berseteru yaitu opsi paket A dan B, yang akhirnya membuat opsi dari PKB tidak di lirik oleh Fraksi yang lain sehingga pilhan tetap kembali ke opsi 20%.

PKB menanggapi opsi dari paket A yang merupakan pilihan terbaik. Kans PKB sebenarnya cukup besar, namun diperlukan batasan dan kriteria yang seharusnya dilalui secara rinci guna mencalonkan diri sebagai Presiden atau wakil Presiden. Sebernarnya ada yang jauh lebih penting dari Presidential Threshold ini, yaitu kondisi politik di Indonesia yang harus stabil untuk mendapatkan sistem demokrasi yang di bangun sejak lama dan dapat terus bertumbuh kearah yang jauh lebih baik lagi.

Penelitian Edy Sanjaya Sitepu (2019), yang berjudul Peran Partai Keadilan Kesejahteraan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kota Medan pada Tahun 2015, penelitian ini terfokuskan pada permasalahan yang dikaji tentang peran PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. PKS merupakan partai yang mana berasaskan Islam yang dulunya dikenal dengan PK. Partai ini dibentuk pada masa era reformasi pada tahun 2002. Partai ini bisa mengambil hati dari masyarakat nasional di ajang pemilihan kepala

daerah dengan memberikan warna baru model politik Islam di Indonesia dengan mengintegrasikan dakwah dan politik menjadi kesatuan gerakan yang berkesan.

Pada pemilihan kepala daerah di tahun 2015 kota Medan paling banyak masyarakatnya yang tidak menggunakan hak suaranya, mencapai 74,55%. Ini merupakan suatu angka yang paling tinggi dari masyarakat kota Medan. Di UU No. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik dimana dalamnya mempunyai tujuan dan fungsi untuk meningkatkan partisipasi dari anggota dan masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Sehingga PKS dapat memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Medan. (*sanjaya Sitepu, 2019 hal 78*)

Hambatan yang paling utama PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada kota Medan ialah banyaknya masyarakat yang trauma terhadap pemimpin yang terdahulu karena tidak membawa kemajuan terhadap Kota Medan. Solusi yang dilakukan PKS ialah melakukan 70% dakwah melalui ceramah ulama akan pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Peran yang dilakukan PKS dalam meningkatkan partisipasinya untuk masyarakat pada pilkada Kota Medan melakukan TOP (Training Orientation Partai) yang merupakan pengenalan sejarah dan jati diri dari partai yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kota Medan yang di hadiri oleh pengurus DPC, Halaqoh yang merupakan sebuah kegiatan positif untuk muslim atau masyarakat muslim yang berada di kota medan, dan TATSQIF (Tarbiyah Tsaqofiyah) merupakan suatu konsep pemikiran dan pandangan hidup yang telah membentuk suatu pola pikir dan perilaku dari masyarakat.

Penelitian Rudi Saputra (2018) yang membahas tentang rekrutmen politik yang dapat menimbulkan basis kekuatan politik partai. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem dan mekanisme rekrutmen yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam merekrut pengurus dan anggota serta memaparkan peran anak muda di dalam PSI agar bisa menjadi basis dan kekuatan politik partai.

Metode kualitatif yang di gunakan dengan strategi penelitian studi kasus dengan melalui analisa deskriptif dari keberadaan PSI yang terkait dengan rekrutmen terhadap pengurus dan anggota serta peran anak muda dalam PSI. dengan menggunakan cara konsep sistem rekrutmen politik membuktikan bahwa rekrutmen pengurus yang dilakukan PSI menggunakan sistem kekerabatan dengan mekanisme secara tertutup dan memiliki kriteria khusus di dalamnya, sedangkan untuk rekrutmen terhadap anggota menggunakan mekanisme secara terbuka dan tidak memiliki kriteria khusus di dalamnya hanya untuk meloloskan PSI dalam verifikasi KPU. *(Rudi Saputra, 2018 hal 103)*

PSI dalam melakukan rekrutmen memiliki faktor penghambat dan juga faktor pendukung. Hambatan yang dimiliki oleh PSI dalam melakukan rekrutmen yaitu server situs resmi partai yang terkadang tidak bisa dibuka, sedangkan faktor pendukung yang dimiliki ialah sosok figur di PSI dan faktor DPD wilayah masing-masing dalam hal melakukan rekrutmen. Fokus anak muda yang menjadi rekrutmen di PSI memiliki peran penting sebagai penggerak partai.

Anak muda di PSI menjadi basis kekuatan penting yang ada di partai. Mereka yang bergerak di PSI sebelumnya bukan pengurus dari partai politik manapun dan partai ini bukanlah pecahan dari partai manapun. Pada akhirnya, peran anak muda

PSI menghadirkan praktek berpolitik yang berbeda dengan memberikan edukasi berpolitik kepada masyarakat dengan cara-cara anak muda, yaitu dengan bekerjasama dengan organisasi kepemudaan yang berafiliasi terhadap partai politik dan memadukan gagasan-gagasan politik yang dimiliki anak muda dengan konten-konten kreatif.

Penelitian yang dilakukan Febri Dyah Sukmawati (2013) dengan judul “Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik (Studi Rekrutmen dan Pendidikan Politik oleh DPC PDI Perjuangan Kulon Progo pada Bakal Calon Legislatif Pemilu 2014)”, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta. (*Dyah Sukmawati, 2013 Hal 225*)

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kulon progo pada Bacaleg pemilu 2014 menunjukkan bahwa kurang berjalannya pengkaderan. Pendidikan politik dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kulon Progo melalui forum diskusi, kuliah umum, kuliah khusus, dan kerja lapangan. 2) Implikasi pola rekrutmen dan pendidikan politik DPC PDI Perjuangan Kulon 45 Progo pada Bacaleg belum menunjukkan secara efektif peran partai politik dalam pendidikan politik. Kurang efektifnya peran partai dalam pendidikan politik dikarenakan dalam pelaksanaannya bersamaan dengan indoktrinisasi politik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai penelitian yang relevan dikarenakan terdapat kesamaan topik penelitian, yaitu peran partai politik. Meskipun dalam penelitian diatas lebih mengarah pada pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan pendidikan politik saja dimana

pembahasan hanya terkerucut pada sistem pemilihan umum. Namun pada penelitian ini fungsi dalam penelitian tersebut dijadikan pandangan untuk melihat bagaimana peran partai politik diluar pemilu

Penelitian dari Dara Atika, 2019, tentang Strategi Pemasaran Partai Politik Baru Dalam Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung 2019 (Studi Pada Partai Perindo, PSI, Berkarya dan Garuda), Universitas Lampung. Penelitian ini terfokuskan dari strategi pemasaran partai politik baru yaitu Perindo, PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda dalam pemilihan DPRD di kota Bandar Lampung pada tahun 2019. Segmentasi yang dilakukan oleh partai perindo ialah masyarakat awam atau menengah bawah hal tersebut sesuai dengan tujuan dari satu program partai untuk kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan PSI, Partai Berkarya mempunyai segmentasi yang sama yaitu semua kalangan ataupun golongan menjadi target segmentasinya. Namun yang membedakannya PSI lebih terfokuskan kepada kalangan milenial dan Perindo pada kalangan menengah bawah.

Target dari partai Perindo dari kalangan menengah bawah terkhususnya yang belum mempunyai pekerjaan sedangkan PSI pada kalangan milenial karena sesuai dengan image yang dibangun yaitu partai anak muda. Partai berkarya tidak memiliki target khusus karena semua kalangan masyarakat menjadi targetnya sedangkan Partai Garuda masyarakat yang menengah kebawah.

